



KERENTANAN DAN KETAHANAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

The Vulnerability and Resilience of Indonesian Migrant Workers At Malaysia in the Midst of The COVID-19 Pandemic

MUNARNI ASWINDO¹, MARGARETHA HANITA², ARTHUR JOSIAS SIMON³

¹Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia, m.aswindo@gmail.com, +628111390809 ²Universitas Indonesia, margaretha.hanita@yahoo.com, +6281382609591 ³Universitas Indonesia, simonrbi@yahoo.com, +6281310201229

ABSTRAK: Per 25 Februari 2021, WHO melaporkan 112,209,815 terkonfirmasi positif covid-19, termasuk 2,490,776 kematian. Untuk mengendalikan penularan covid-19, sebagian besar negara menerapkan pembatasan sosial baik pembatasan sosial yang terbatas atau secara penuh. Di Malaysia untuk mengendalikan penularan covid-19, pemerintah Malaysia menerapkan Pembatasan Mobilisasi Sosial atau *Movement Control Order* (MCO). Kebijakan ini mengarahkan penghentian sementara kegiatan perkantoran dan bisnis kecuali yang bersifat esensial dan pelayanan publik. Penelitian bertujuan menyelidiki dampak pemberlakuan MCO dan penghentian sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia pada kerentanan dan ketahanan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menarasikan data statistik dan informasi terkait PMI yang dihimpun oleh lembaga kredibel dalam pengumpulan data baik itu BI, BPS, BP2MI serta Kementerian Ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan MCO dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No.120 tentang penghentian sementara pengiriman PMI ke luar negeri berdampak pada Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Sebagian dari mereka kehilangan pekerjaan, ada yang pulang ke Indonesia, ada yang tetap bertahan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penerapan Pembatasan Mobilisasi Sosial baik di Malaysia dan Penghentian sementara PMI ke luar negeri demi melandaikan dan mengendalikan penularan covid-19 telah berdampak pada pasar Pekerja Migran Indonesia baik dari penawaran maupun pada sisi permintaan.

Kata kunci: ketahanan, kerentanan, pekerja migran, covid-19, resiko, ekonomi.

ABSTRACT. As of February 25, 2021, WHO reported 112,209,815 confirmed positive for Covid-19, including 2,490,776 deaths. To control the transmission of covid-19, most countries have implemented social restrictions, either limited or full social restrictions. In Malaysia to control the transmission of covid-19, the Malaysian Government has implemented restrictions on social mobility or a *Movement Control Order* (MCO). This policy directs the temporary suspension of office and business activities, except for essential ones and public services. The study aims to investigate the impact of the implementation of the MCO and the temporary suspension of sending Indonesian Migrant Workers on the vulnerability and resilience of Indonesian Migrant Workers in Malaysia. This study uses a qualitative research method by narrating statistical data and information related to TKI collected by credible institutions in data collection, be it BI, BPS, BP2MI and the Ministry of Manpower. From the results of this study, it is known that MCO enforcement and the Decree of the Minister of Manpower No.120 concerning the temporary suspension of sending PMIs abroad have an impact on Indonesian Migrant Workers in Malaysia. Some of them lost their jobs, some returned to Indonesia, some remained.

Keywords: resilience, vulnerability, migrant workers, covid-19, risk, economy.

PENDAHULUAN

COVID-19 telah ditetapkan sebagai penyakit pandemik oleh WHO. Penerapan strategi karantina wilayah dan pembatasan sosial skala terbatas demi mengendalikan persebaran virus berdampak pada terbatas pergerakan manusia dan melambatnya aktivitas ekonomi. Akhir Juni 2020, setidaknya, 77% negara yang diobservasi oleh Oxford melakukan penutupan tempat usaha, Sembilan diantaranya masih memberlakukan penutupan ketat secara total meski beberapa sektor penting tetap dibuka. Asian Development Bank (ADB) memperkirakan jumlah kesempatan kerja akan turun sebesar 167 juta orang per bulan. Apabila tidak ada upaya mencegah penurunan kesempatan kerja, maka akan berdampak penurunan tingkat upah, dengan perkiraan penurunan berkisar \$ 359 miliar menjadi \$ 550 miliar. Pekerja migran termasuk kelompok potensial yang paling terdampak (ADB, 2020)

Pekerja Migran pada umumnya yang berasal dari Asia dan Pasifik. Kontribusinya mencapai 33% dari total pekerja migran di seluruh dunia pada tahun 2019. Negara utama tujuan pekerja migran Asia meliputi Asia (35%), Tengah Timur (27%), Eropa termasuk negara bagian Rusia (19%), dan Amerika Utara (18%). Sementara di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penempatan Pekerja Migran Indonesia 276.553 orang pada tahun 2019. Dengan tiga negara tujuan utama, yakni Asia Timur (57%), Asia Tenggara (38%), dan Timur

Tengah (3%) serta Eropa dan lainnya (2%). Apabila dilihat menurut negara tujuan, pekerja migran lebih banyak bekerja di Malaysia (28,81%), Taiwan (28,77%), Hongkong (25,62%), dan Singapura (7%) serta Arab Saudi (2,56%), Korea Selatan (2,24%), Brunei Darussalam (2,04%). ADB memproyeksikan berkontraksi dari 6,7% menjadi 10,2% pada tahun 2020 (ILO, 2020).

Setidaknya, ada tiga dampak pada pekerja migran akibat pandemik COVID-19,

yakni: Pertama, kelompok pekerja yang tetap berada di negara penempatan namun tetap bekerja, Kedua, Kelompok pekerja yang bekerja pada sektor ekonomi terdampak, Ketiga, Kelompok pekerja migran yang hendak berangkat ke negara penempatan (EBRD, 2020).

Pada situasi sulit, para pekerja migran diperhadapkan pada dilema antara mempertahankan kelangsungan kehidupan dan menyelamatkan hidup. Meskipun banyak diantara pekerja migran merasakan dampak ekonomi lebih besar dari dampak kesehatan yang disebabkan oleh COVID-19. Meski COVID-19 menakutkan dan mengkhawatirkan, namun rupanya kekhawatiran akan kelaparan karena tidak memiliki pekerjaan juga tidak kalah menakutkan. Pada situasi krisis yang dilematik seperti ini, pekerja migran harus terus bekerja demi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Pekerja migran Indonesia semakin menderita karena kebijakan *total lockdown* negara tempat bekerja dan himbuan pemerintah untuk tidak kembali dulu ke Indonesia.

Di Malaysia, ada sekitar 2,5 juta pekerja migran dengan upah rendah terancam di rumahkan tanpa gaji dan paling miris, ada 400.000 pekerja yang terusir dari rumah kontrakan karena tidak mampu membayar sewa. Kekhawatiran bertambah pada kehidupan ekonomi pada keluarga di kampung karena telah beberapa bulan tidak mengirimkan uang untuk keluarga (Kompas, 2020)

Pandemik COVID-19 tidak hanya menyebabkan pekerja migran kehilangan pekerjaan dan upah di luar negeri namun juga menurunkan Remitansi yang dikirim ke negeri asal pekerja. Secara global Remitansi dapat turun hingga \$ 100 juta dolar pada negara berpendapatan menengah dan bawah. Remitansi pekerja migran berkontribusi sebesar 5 persen dari PDB negara berpendapatan menengah dan rendah bahkan pada negara Haiti, Bermuda,

Nepal, Tajikistan berkontribusi 30 persen terhadap PDB. Penurunan Remitansi ini memberikan dampak dua sekaligus (*brace impact*) yakni: 1) menurunkan pendapatan keluarga pekerja migran dan 2) penerimaan negara. International Monetary Fund (IMF) menyebut, Remitansi ini dapat menutup defisit transaksi berjalan dan sumber pendapatan pajak, baik itu: *Value Added tax* dan Pajak Penjualan (World Economy Forum, 2020)

Penelitian ini menganalisa dampak kebijakan pemberlakuan pembatasan mobilisasi sosial (*Movement Control Order*) terhadap pada pekerja migran baik itu kesempatan kerja maupun peluang untuk ditempatkan kerja di luar negeri pada masa pandemik; bagaimana pekerja migran Indonesia bertahan; serta kebijakan apa saja yang diaplikasikan pemerintah dalam melindungi para pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menarasikan data statistik dan kajian dari BP2MI, BPS, BI, ILO, dan ADB terkait pekerja migran. Penelitian kualitatif ini menghubungkan hubungan antara variabel, fenomena dan lain-lain dengan menggunakan pengukuran numerik dengan menggunakan data kualitatif (Hanita, 2020).

Pandemik Covid-19, Pelemahan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Pekerja Migran

Pekerja migran lebih rentan kehilangan pekerjaan ketika ekonomi mengalami kontraksi (Dustmen, et al, 2010). Resiko kehilangan pekerjaan akan semakin rentan dialami oleh pekerja migran pada saat pandemik COVID-19 dan melemah perekonomian yang dipicu oleh kebijakan pemerintah untuk karantina wilayah total dan menurunnya konsumsi rumah tangga atas barang dan jasa (Fassani dan Mazza, et al, 2020). Pekerja migran yang kehilangan pekerjaan akibat pelemahan ekonomi seringkali dirumahkan tanpa dibayar upahnya, memiliki

tabungan yang rendah, akses pada jaminan sosial rendah. Pada titik ini, pekerja migran dimiskinkan dan dimarginalkan.

Keinginan pekerja migran pula ke daerah asal diperhadapkan pada kebijakan pemerintah negara asal para pekerja migran yang menghimbau untuk tidak kembali ke negara asal. Ada pula negara tersebut menerapkan karantina wilayah total dengan menutup pintu masuk kedatangan dari luar negeri. Pada kondisi ini membuat pekerja migran semakin menderita: tidak bekerja, tidak menerima upah, tabungan rendah, terancam tidak mampu membayar sewa rumah kontrakan. Pekerja migran berupaya berhemat dengan mengurangi konsumsi dan mengkonsumsi makanan rendah nutrisi demi untuk bertahan hidup di perantauan. Ada pula yang mendapat bantuan pangan dari LSM di masa pandemik.

Di masa pandemik COVID-19, para pekerja migran paling rentan tertular COVID-19. Pada umumnya pekerja migran tinggal di daerah yang padat penduduk dan jenis pekerjaan yang selalu menciptakan kerumunan orang atau kontak erat dengan orang lain atau orang lain yang memiliki resiko tinggi tertular COVID-19. (Fassani dan Mazza, et al 2020).

Meskipun COVID-19 berdampak pada pelemahan ekonomi terjadi dan beresiko menurunkan peluang kesempatan kerja pekerja migran. Namun dampak yang dirasakan para pekerja migran berbeda setiap negara dan sektor ekonominya. Tergantung besarnya perlambatan ekonomi dan tingkat pengendalian penyebaran COVID-19. Negara-negara yang mampu mengendalikan penyebaran COVID-19 cenderung akan lebih melonggarkan kegiatan ekonomi. Pada titik ini, kesempatan kerja masih ada, meskipun tidak tumbuh lebih baik dibandingkan kondisi normal.

Selain itu, tidak semua sektor ekonomi terdampak akibat menurunnya permintaan barang dan jasa. Pada situasi krisis ekonomi, pada umumnya sektor yang paling terdampak adalah sektor manufaktur, pariwisata, perdagangan, hotel, dan restoran, konstruksi. Sementara sektor

industri produk kesehatan, pelayanan kesehatan serta jasa logistik akan meningkat lebih besar di masa pandemik.

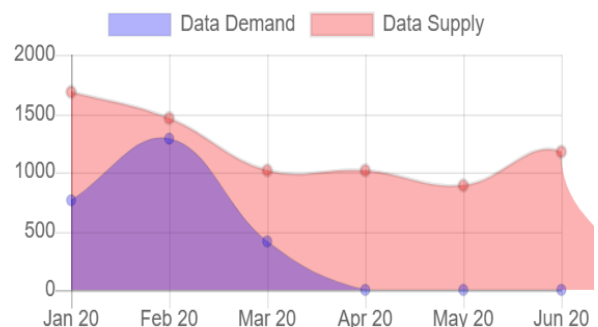
Di masa krisis ekonomi, berkurangnya kesempatan kerja dan menurunnya permintaan tenaga kerja migran akan mengurangi jumlah remitansi yang dikirim pekerja migran pada negara asal. Remitansi merupakan bagian dari pendapatan yang dikirimkan ke negeri asal pekerja migran, Sejatinnya, Remitansi yang dikirimkan pekerja migran untuk menunjang pendapatan ekonomi keluarga di kampung halaman, baik itu untuk keperluan hidup harian, sekolah, membangun rumah membayar utang bahkan diinvestasikan untuk usaha maupun membeli asset lain. Secara tidak langsung, remitansi yang dikirimkan oleh pekerja migran dapat menambah cadangan devisa dan maupun penerimaan pajak negara tidak langsung baik dalam bentuk pajak pertambahan nilai maupun pajak penjualan. Pada negara-negara berpendapatan menengah dan kecil, bahkan kontribusi remitansi jauh lebih besar dari jumlah Foreign Direct Investment (FDI) terhadap PDB.

Kebijakan Pemerintah Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Masa Pandemi

Pada awalnya, COVID-19 dianggap wabah biasa yang penyebarannya lokal dan bisa dikendalikan penyebarannya dalam jangka pendek. Pada saat yang sama pengiriman PMI masih tetap dilakukan hingga bulan Maret 2020. Meski terkonfirmasi Positive Covid-19, 8 ABK Indonesia di kapal Diomand Princess dan satu pasien Pekerja Rumah Tangga yang bekerja di Singapura pada bulan Februari 2020. Pada Tanggal 18 Maret 2020, secara resmi Malaysia menerapkan *Mobility Control Order* (MCO). Pada periode ini, Pemerintah Malaysia membatasi penggunaan tenaga kerja sebesar 50 persen dari di tempat kerja. MCO berlaku hingga 9 Juni 2020. Selama 4 bulan pemberlakuan MCO, Pekerja Migran dengan upah harian dan pekerjaan berbasis kinerja tidak dibolehkan bekerja. Meskipun beberapa pekerja tetap diizinkan untuk

bekerja paruh waktu dan beberapa lainnya tidak dibolehkan bekerja.

Sebagai respon, akan hal itu, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran terkait perlindungan terhadap PMI. Namun isi dari surat edaran ini dianggap diskriminatif karena mengabaikan keberadaan pekerja informal. Pada tanggal 18 maret pemerintah 2020, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri (Kemenaker) Nomor 151 Tahun 2020 yang menyatakan Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Penghentian sementara PMI, menyebabkan jumlah penempatan PMI mengalami mengalami penurunan signifikan. Dari 32 negara penempatan, masih ada dua negara yang masih menerima penempatan PMI yakni: Taiwan dan Hongkong, meskipun dalam skala terbatas.



Gambar 1. Penempatan PMI Ke Luar Negeri

Penawaran PMI juga mengalami penurunan sebagaimana Permintaan PMI. Ini berarti, Pekerja Migran Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri juga cenderung mengalami penurunan. Di awal Januari 2020 berkisar 1.700 orang. Namun sejak diberlakukan pemberhentian sementara, bulan Maret 2020, jumlah Pekerja Migran yang mengajukan lamaran untuk bekerja di luar negeri cenderung menurun dikisaran 900 –1.200 per bulan.

Ada kecenderungan keinginan penduduk usia produktif bekerja di luar negeri mengalami penurunan, dilandasi beberapa kondisi: 1) adanya informasi beberapa negara tujuan menerapkan *lockdown*; 2) Ada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 151 Tahun 2020 tentang pemberhentian sementara Penempatan

Pekerja Migran Indonesia; 3) penduduk lebih memilih untuk berdiam diri di rumah sebagai upaya untuk menghindar tertular COVID-19; 4) Ada banyak persyaratan untuk bekerja di luar negeri semakin banyak yang berpotensi meningkatkan biaya penempatan.

Namun meskipun keinginan bekerja di luar negeri mengalami penurunan, masih banyak pula penduduk usia produktif yang ingin tetap bekerja di luar negeri; hal ini disebabkan oleh: 1) ada peluang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi di luar negeri walaupun dengan memiliki tingkat pendidikan tidak terlalu tinggi, 2) ada desakan beban ekonomi yang lebih tinggi seperti biaya pendidikan anak dan keluarga, 3) ada beban utang keluarga, 4) keinginan untuk berinvestasi dan memiliki aset.; 5) Di Malaysia ada kecenderungan “*gap shortage*” Kesempatan kerja semakin besar karena tenaga kerja lokal bukan *perfect substitution* bagi pekerja migran. Untuk jenis pekerjaan yang *low skill* dan *low paid*. Tenaga kerja lokal pada umumnya telah memiliki pendidikan tinggi tidak tertarik mengisi kekosongan kesempatan pekerjaan informal yang cenderung *dirty, dangerous, dan difficult (3D)*.

Dampak Kebijakan Pembatasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

Penghentian penempatan PMI pada 30 negara tujuan utama, berdampak pada semakin besarnya “*gap excess supply*” Pekerja Migran Indonesia. Ini sesuatu yang paradoks, normalnya, ditengah meningkatnya jumlah pekerja yang di PHK dan meningkatnya angka kemiskinan, seharusnya mendorong penawaran PMI untuk bekerja diluar negeri. Namun data menunjukkan fakta sebaliknya justru penawaran PMI keluar negeri mengalami penurunan. Kondisi anomali menunjukkan mobilisasi tenaga kerja antar sektor di Indonesia cukup kaku. Ada kecenderungan tenaga kerja korban PHK lebih senang menunggu pekerjaan yang sama dibandingkan beralih sector lain. Pada sisi lain pula, tenaga kerja juga memiliki informasi peluang bekerja semakin sulit karena hampir semua negara menerapkan *Pembatasan*

Mobilitas Sosial. Informasi ini menjadi dasar keputusan untuk bekerja di luar negeri. Selain itu, Pada umumnya calon Pekerja Migran Indonesia lebih banyak berasal dari pedesaan.

Tercatat, lebih dari 72 persen PMI berasal dari desa (BP2MI, 2020). Sementara konsentrasi penanggungan lebih banyak pada sektor industri dan jasa perdagangan yang terkonsentrasi di kota. Para pekerja yang kehilangan pekerjaan di kota lebih memilih untuk menunggu daripada harus mencari peluang bekerja di luar negeri.

Repatriasi Pekerja Migran Indonesia

Bulan Maret, Kasus COVID-19 telah menyebar seluruh dunia. Negara-negara meresponnya dengan menerapkan *lockdown* baik pada skala besar maupun terbatas. Konsekuensinya, Ekonomi bergerak lamban. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi fenomena umum. Dampaknya, banyak PMI kehilangan pekerjaan. Setidaknya, ada 70,367 orang PMI direpatriasi karena kehilangan pekerjaan di negara tempat bekerja. Per April 2020, total PMI telah ada 68,129 orang yang kembali dengan menggunakan kapal (69 persen), bus (18 persen) dan pesawat (13 persen). (Antarnews, 2020).

Namun bila dibandingkan dengan data BP2MI, ada perbedaan antara data keputugangan PMI dengan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri. Perbedaan ini karena data yang dihimpun oleh BP2MI merupakan penempatan PMI melalui kerjasama *Government to Government* dan *Government to Business*. Sementara penempatan PMI melalui *Business to Business* dan ilegal tidak dicatat di *database* BP2MI.

Kerentanan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

Kebijakan pemerintah Indonesia yang melakukan pembatasan pengiriman PMI dan penerapan MCO tidak hanya menyebabkan pekerja migran terisolasi namun pada ruang kerja mereka kehilangan pekerjaan. Bukan hanya

kehilangan pekerjaan, bagi pekerja migran yang tetap bekerja di masa pandemik, justru mengalami tambahan waktu bekerja tanpa mendapatkan upah tambahan. Setidaknya, ada 4 kerentanan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia di Malaysia akibat pemberlakuan MCO dan penghentian sementara penempatan PMI di Malaysia. antara lain: 1) PMI mengalami penurunan pendapatan, kehilangan pendapatan dan bekerja tidak tentu. Sejak pemberlakuan MCO, Pemerintah Malaysia membatasi penggunaan tenaga kerja baik penggunaan tenaga kerja dengan basis upah harian, per jam dan tingkat produktifitasnya.

Secara akumulatif pendapatan per bulan Pekerja Migran Indonesia mengalami penurunan dan jumlah remitansi yang dikirim PMI ke Indonesia mengalami penurunan; 2) PMI rentan mengalami kelaparan. Pada umumnya pekerja migran Indonesia di Malaysia tinggal jauh dari pusat kota. Untuk menuju ke kota membutuhkan waktu lama dan pembatasan jam operasional toko retail dan pasar membatasi akses mereka untuk mendapatkan makanan. Keadaan ini diperparah dengan harga bahan pokok di toko grosir tempat PMI tinggal sangat tinggi (SUHAKAM,2020).

Bagi PMI penempatan ilegal justru mengalami kondisi yang semakin sulit. PMI penempatan ilegal tidak hanya harus merasakan sulitnya mendapatkan makanan karena faktor jarak jauh dan harga tinggi, namun juga karena timbul perasaan takut untuk keluar berbelanja bahan makanan karena resiko ditahan oleh aparat keamanan polisi Malaysia. Meskipun ada bantuan makanan dan kebutuhan sehari-hari dari LSM dan lembaga kemanusiaan namun bantuan itu tidak cukup memadai untuk menjangkau semua pekerja ilegal. Apalagi bantuan pangan untuk PMI disalurkan melalui penduduk lokal tidak menjangkau para PMI. (SUHAKAM,2020); 4) Kerentanan PMI tertular Covid-19 dan terbentuknya cluster covid-19 di tempat tinggal. Pada umumnya PMI tinggal di tempat yang kurang layak karena sanitasi buruk, kekurangan air bersih dan listrik serta ruangan melebihi kapasitas

hunian. Pada saat pemberlakuan MCO, PMI lebih banyak di rumah sehingga sangat sulit menerapkan “social distancing” dan perilaku hidup sehat; 5) Kerentanan meningkatnya pelanggaran hak pekerja. Sejak diberlakukan MCO di Malaysia Bulan Maret, beberapa pekerja tidak dibayarkan upah untuk bulan februari, diputus kontrak secara sepihak. Konsekuensinya beberapa pekerja migran tidak lagi mengirimkan remitansi di Indonesia, namun kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya dan terusir dari rumah kontrakan dan memaksa mereka untuk tinggal di ruangan yang sempit bersama sesama pekerja migran. (SUHAKAM, 2020)

Ketahanan Pekerja Migran Indonesia Menghadapi Pandemi Covid-19

Perbelakuan Aturan Pembatasan Mobilisasi Sosial (*Movement Control Order*) pada awal maret, para pemberi kerja tidak lagi memperkerjakan para Pekerja Migran. Ada pekerja migran upah dibayar dari sisa kontrak, beberapa lainnya tidak dibayar upahnya bahkan diputus kontrak secara sepihak. Para Pekerja migran Indonesia berupaya bertahan dari sisa tabungan di Malaysia sembari berharap covid-19 berakhir.

Pemerintah Malaysia mengeluarkan sekitar 919 trilyun rupiah Rupiah untuk paket stimulus kesehatan dan ekonomi termasuk dukungan ekonomi dan pengangguran yang terdampak covid-19. Begitupun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sebesar 405,1 Trilyun rupiah. Namun tidak menjadikan prioritas perlindungan pada pekerja migran domestik dan PMI ilegal.

Bagi Pekerja Domestik dan Pekerja migran nirdokumen yang tidak memiliki cukup tabungan untuk bertahan hidup di masa pandemic memilih untuk pulang baik melalui bandara dan pelabuhan. Bahkan untuk pekerja migran tidak berdokumentasi memilih jalur laut yang tidak resmi menggunakan kapal kecil yang beresiko membahayakan nyawa mereka.

Beberapa pekerja migran ada yang tetap bertahan di Malaysia meski tidak bekerja lagi. Mereka hidup dengan sisa tabungan yang



tersedia. Apabila tabungan habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kondisi serba susah, rasa solidaritas antara sesama pekerja migran semakin kuat. Hal ini ditunjukkan dengan apabila pekerja migran menerima bantuan dan merasa tidak pantas mereka akan menolak bantuan itu dan memberikan pada pekerja migran lain yang lebih membutuhkan.

Di Malaysia, ada Serikat Pekerja PERTIM yang menyediakan nomor kontak untuk memberikan konseling dan menerima laporan dari para pekerja migran terutama pekerja domestic. Menurut laporan PERTIM setidaknya ada 600 orang pekerja migran Indonesia menelpon membutuhkan bantuan pangan bantuan pangan. (IDWD, 2020)

Kemampuan Serikat Pekerja Pertim untuk memenuhi kebutuhan pangan para pekerja migran sangat terbatas. Mereka menggalang menghubungi dan meminta bantuan dari kedutaan besar, NGO, Yayasan untuk menggalang dana bantuan kepada pekerja migran terdampak covid-19. Pada akhirnya, serikat pekerja PERTIM telah hanya mampu menyediakan bantuan pangan berupa beras, makanan kaleng, telur, dan minyak (IDWD,2020).

Beberapa Pekerja Migran baik pekerja domestik maupun pekerja ilegal memilih tetap bertahan meski rasa kuatir atas masa depan mereka selama pandemi. Mereka pun tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Meski mereka tidak mendapat perhatian dan belum terjangkau oleh kebijakan pemerintah. Namun mereka selalu yakin akan bertahan hidup dan kembali pekerja hanya solidaritas dan kepedulian antara sesama pekerja migran.

KESIMPULAN

Penerapan Pembatasan Mobilisasi Sosial baik di Malaysia dan Penghentian sementara PMI ke luar negeri demi melandaikan dan mengendalikan penularan covid-19 telah

berdampak pada pasar Pekerja Migran Indonesia baik dari penawaran maupun pada sisi permintaan. Meskipun ada kecenderungan keinginan penduduk Indonesia untuk bekerja di luar negeri di masa pandemi masih tinggi. Hal ini didasarkan adanya beban ekonomi keluarga yang semakin tinggi di masa pandemik yang mengharuskan mereka untuk selalu mencari peluang meski dalam situasi krisis. Namun lonjakan penawaran PMI pada saat Pandemi, tidak berbanding lurus dengan lonjakan PHK disektor industri dan jasa. Ini menandakan mobilisasi tenaga kerja antar sektor cenderung kaku. Pekerja yang mengalami PHK sektor industri dan jasa di perkotaan pada umum cenderung memilih untuk menunggu ekonomi pulih daripada pindah sektor lain untuk bekerja. Repatriasi Pekerja Migran Indonesia juga yang dikoordinasikan oleh kementerian Luar Negeri dan Satgas COVID-19 membuat data pencatatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berbeda. Ini menandakan sinergitas dan ego sektoral pemulangan PMI masih ada. Bagi PMI yang masih bekerja di Negara penempatan justru mengalami perlakuan tidak adil dan diskriminasi. Stigma PMI sebagai pembawa virus COVID-19 semakin besar. Pada sisi lain, mereka harus bekerja dua kali lebih besar, kehilangan waktu libur, dan menanggung biaya tambahan untuk perlindungan diri ketika bekerja.

SARAN

1. Kementerian Luar Negeri bersama BP2MI harus meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam hal penempatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri bukan hanya untuk menimanilisir perbedaan pendataan PMI



namun untuk memperluas jangkauan pemberdayaan PMI dan PMI purna kerja di luar negeri.

2. Membuka Satgas Aduan PMI di KBRI di luar negeri yang beranggotakan tidak hanya dari pegawai keduataan namun juga perwakilan BP2MI di luar negeri.
3. Mengedukasi Protokol Kesehatan dan Penyediaan bantuan alat perlindungan diri berupa masker, *faceshield*, dan *hand sanitizer* bagi para pekerja migran serta bantuan pangan, vitamin, dan *shelter* untuk korban PHK yang tidak mampu sewa rumah tinggal.



DAFTAR PUSTAKA

- ADB Birefs. 2020. COVID-19 Impact on International Migration, Remittances, and Recipient Households in Developing Asia
- Asian Development Bank (ADB). 2020. An Updated Assessment of the Economic Impact of COVID-19. ADB Briefs. No. 133. Manila.
- Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.2020. Publikasi Data Penempatan dan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia. Balitbang B2PMI. 2020.
- Baldwin, Richard. 2020. Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes
- EBRD-IFC. 2020. Vulnerabilities of migrant workers during the Covid-19 pandemic. European Bank.
- Fassani, F dan Mazza. J.2020. A Vulnerable Workforce: Migrant Workers in the COVID-19 Pandemic. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020.
- Gao, X., A. Kikkawa, and J. W. Kang. 2020. Evaluating the Impact of Remittances on Human Capital Investment in the Kyrgyz Republic.
- Hanita, M. 2020. Pemikiran-Pemikiran Strategik Intelegen. UI Publishing.
- Hanita, M. 2020. Ketahanan Nasional: Teori, Adaptasi dan Strategi.UI Publishing.
- Human Right Commission Of Malaysia (SUHAKAM). 2020. Dialogue O Vurnerable Communities: assessment of Need and next step amids covid-19/
- International Organization for Migration (IOM). 2020. Migrant Workers Stream Home as Thailand's Economy Goes into COVID-19 Lockdown. Press release. 27 March.
- International Labour Organization (ILO). 2020. Regulating recruitment of migrant workers: An assessment of complaint mechanisms in Thailand. International Labour Organization (ILO). 2020. ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work (Second edition).
- ILO.2016. Regulating recruitment of migrant workers: An assessment of complaint mechanisms in Thailand.
- ILO. 2016. Ways Forward In Recruitment Of Low-Skilled Migrant Workers in the Asia- Arab States corridor.
- ILO.2020 Experiences of ASEAN migrant workers during COVID-19
- IOM. 2020. COVID-19 AND WOMEN MIGRANT WORKERS: Impacts and implications.
- IOM. 2020. The Montreal Recommendations on Recruitment: A Road Map towards Better Regulation
- Issabella. 2017. Strengthening The National Resilience of Indonesia Through Socialization of National Insight. Palembang.
- International Domestik Worker Federartion (IDWF).2020. Malaysia: "In This Pandemic, We Got Nothing But Solidarity: The Struggle of Migrant Domestic Worker In Malaysia In Surviving The Lockdown.
- JICA Research Institute. 2020. Migration, Living Conditions and Skills: Panel Study - Tajikistan, 2020. Tokyo.
- Khadka, U. 2020. Crossborder Virus and Nepali Migrant Workers. Nepali Times. 10 March.
- Kikkawa, A. and K. Otsuka. 2020. The Changing Landscape of International Migration: Evidence from Rural Households in Bangladesh, 2000–2014. Oxford Development Studies. DOI:
- Laura, F dan Nicola.P. 2020. COVID-19 and Women Migrant Worker: Impacts and implications. International Organization for Migration.
- Susilo, Wahyu. 2020. Kerentanan Pekerja Migran Indonesia Menghadapi Wabah COVID-19. Indonesia.
- Wahab, Andika.2020. The Outbreak of Covid- 19 In Malaysia : Pushing Migrant Worker At Margin. Malaysia.100073
- Widiuseno, Iriyanto. 2013. Ketahanan Nasional



Dalam Pendekatan Multikulturalisme.
Yogyakarta.

World Bank Indonesian report. 2017. Indonesia's
Global Workers: Juggling Opportunities &
Risks.

World Bank Report. 2017. Indonesia's Global
Worker: Juggling Opportunities and Risk.
World Bank Indonesia.

World Economic Forum. 2020. Impact COVID-
19 on Remittances Migran Worker and
LowIncome Economy.

Yazid, Sylfia. Indonesian Labour Migration:
Identifying the Women.